

Pengaruh Integritas Aparatur Sebagai Variabel Moderat Terhadap *Fraud Diamond Theory* Dan Efektivitas Belanja Pemerintah Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Takalar

Muh. Arif^{✉1}, Nurdiansyah²

Bisnis Digital, Universitas Dipa Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji aspek pada *fraud diamond theory* terhadap efektivitas belanja pemerintah dengan integritas sebagai variabel moderasi. Penelitian yang dilakukan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar ini memilih pejabat pengelola keuangan dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas belanja negara sebagai sampel. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aspek-aspek pada *fraud diamond theory* berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja pemerintah dan integritas mampu memperlemah pengaruh negatif aspek-aspek *fraud diamond theory* tersebut terhadap efektivitas belanja pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan integritas aparatur terutama yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan negara dalam bentuk peningkatan kesadaran bagi pejabat pengelola keuangan mengenai pentingnya efektivitas dalam pengelolaan belanja pemerintah.

Kata Kunci: *Efektivitas, Integrasi, Moderasi.*

Abstract

This study aims to test aspects of the fraud diamond theory on the effectiveness of government spending with integrity as a moderating variable. The research conducted in the Takalar Regency Religious Affairs Ministry Office environment selected financial management officials and / or officials responsible for state spending as samples. The total sample used in this study was 70 respondents. The results revealed that the aspects of the fraud diamond theory negatively affect the effectiveness of government spending and integrity is able to weaken the negative influence of the aspects of the fraud diamond theory on the effectiveness of government spending. This shows the importance of strengthening the integrity of the apparatus, especially those directly involved in managing state finances in the form of increasing awareness for financial management officials regarding the importance of effectiveness in managing government spending.

Keywords: *Effectiveness, Integration, Moderation*

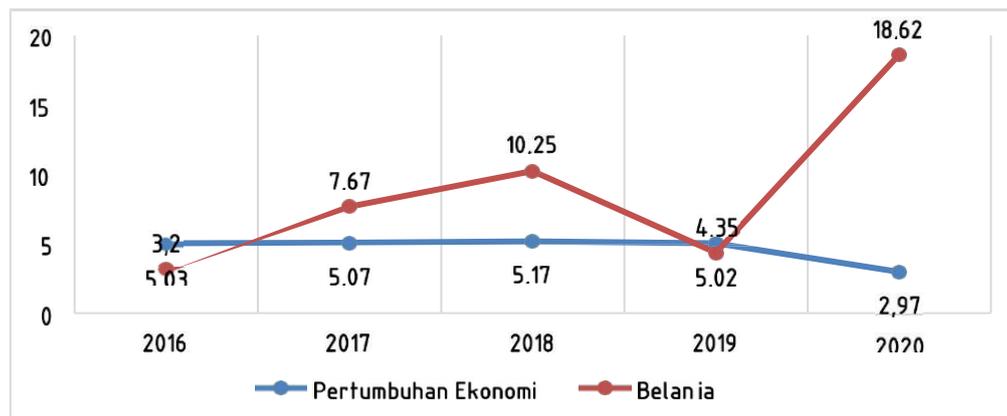
Copyright (c) 2022 Muh. Arif & Nurdiansyah

✉ Corresponding author :

Email Address : nurdiansyah@undipa.ac.id

PENDAHULUAN

Efektivitas belanja pemerintah diyakini akan mempengaruhi aspek politik, ekonomi dan budaya sehingga menciptakan stabilitas bernegara yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Faisol, 2018; Kisieliauskas & Rudgalvis, 2017) maupun kesejahteraan masyarakat (Lewis, 2013; Nourmanita, 2015; Solihin et al., 2017). Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik sebagaimana tercantum dalam Gambar 1 menunjukkan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat dikatakan tidak mengalami perubahan yang berarti. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan nilai belanja pemerintah dalam kurun waktu yang sama, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belanja pemerintah belum dilakukan secara efektif.



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pemerintah

Sumber : www.bps.go.id (data diolah, 2021)

Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota merupakan unit Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi Kementerian Agama di Kabupaten Kota (PMA Nomor 19/2019, Pasal 7). dalam melaksanakan tugas tersebut kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota; (b) pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama; (c) pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf; (d) pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; (e) pembinaan kerukunan umat beragama; (f) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; (g) pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan (h) pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.

Terwujudnya pelayanan yang berkualitas akan berdampak pada kehidupan bernegara. Beberapa program Kementerian Agama yang menjadi program prioritas nasional karena berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bahkan mendapat porsi anggaran khusus yang besar.

Rendahnya efektivitas belanja merupakan indikasi pengelolaan keuangan yang belum sesuai dengan ketentuan disebabkan oleh perilaku oportunistik dari para pejabat pengelola keuangan mengakibatkan belanja yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui sebelumnya. Teori keagenan memandang perilaku oportunistik sebagai penyebab terjadinya masalah keagenan yang berujung pada pengabaian agen terhadap kepentingan prinsipal (Sari & Meiranto, 2017). Praktik teori keagenan dalam pemerintah menempatkan para pejabat publik sebagai agen yang bertugas untuk memaksimalkan keuntungan bagi rakyat sebagai prinsipal selain meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri.

Hubungan principal-agent dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi karena agen memiliki lebih banyak informasi mengenai pengelolaan keuangan dibandingkan prinsipal. Adanya asimetri informasi memberikan peluang kepada para pejabat publik untuk memanipulasi informasi yang dimilikinya. Kondisi ini yang mendorong para pejabat publik melakukan perilaku oportunistik yang diasumsikan sebagai tindakan untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Pengelolaan keuangan, dalam hal ini belanja pemerintah, yang diwarnai dengan perilaku oportunistik para pejabat publik dapat mengakibatkan penyimpangan yang mengarah pada tindakan fraud (Supiani, 2020). Sayangnya tindakan ini dianggap lazim dalam instansi pemerintah meskipun dapat berdampak pada efektivitasnya belanja yang rendah dan belum berdampak pada peningkatan kemakmuran rakyat. Ulasan tersebut menunjukkan perlunya efektivitas belanja pemerintah untuk diinvestigasi lebih lanjut.

Pada penelitian terdahulu, efektivitas belanja pemerintah diuji dengan indikator prioritas, ketepatan alokasi, ketepatan waktu, transparansi dan akuntabilitas yang menunjukkan pengaruh positif variabel-variabel tersebut terhadap efektivitas belanja pemerintah. Selain itu, efektivitas belanja pemerintah juga diuji dengan rasio efektivitas namun masih menunjukkan hasil bervariasi pada tahun tertentu (Hasanah & Anitasari, 2020). Variabel lain yang digunakan untuk menguji efektivitas belanja pemerintah adalah tindak korupsi dengan hasil penelitian berupa terjadinya perubahan komposisi belanja pemerintah dan menurunnya belanja yang seharusnya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat akibat adanya tindak korupsi yang dilakukan dalam lingkup pemerintahan (Dincer & Teoman, 2019; Duerrenberger & Warning, 2018; Haryanto & Astuti, 2017; Subandoro & Amir, 2017). Sementara itu, pengaruh kompetensi pengelola keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif (Bulan et al., 2017; Tanzerina, 2017). Hal berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan atas pengaruh kompetensi pejabat pembuat komitmen terhadap belanja barang/jasa dan belanja modal yang justru menunjukkan hasil yang negatif (Angrina, 2017; Rerung et al., 2017).

Korupsi sebagai salah satu bentuk fraud diyakini dapat mengubah komposisi belanja pemerintah mengakibatkan berkurangnya belanja yang seharusnya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Implikasi lebih jauh menunjukkan bahwa tindakan korup yang melibatkan pejabat publik juga diyakini berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, setiap kecurangan yang dilakukan oleh pejabat publik ternyata memiliki potensi untuk meningkatkan besaran belanja pemerintah dan justru menurunkan produktivitas pada sektor-sektor publik (Subandoro & Amir, 2017). Dengan kata lain, tingkat korupsi suatu instansi pemerintah berbanding terbalik dengan kualitas pelayanan yang disediakan dalam institusi tersebut karena instansi dengan tingkat korupsi yang tinggi tidak mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbiaya rendah. Dalam penelitian yang dilakukan pada 54 negara berkembang, menyimpulkan bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas dari perilaku fraud berpengaruh terhadap tingkat pembangunan manusia yang berpengaruh pada efektivitas pengeluaran pemerintah dan PDB negara-negara tersebut.

Perilaku fraud dilakukan dengan latar belakang yang berbeda-beda, dilakukan pada aktivitas yang berbeda dan dengan motivasi yang berbeda-beda pula (Mackevičius, 2012). Dalam konsep fraud diamond theory (FDT), tindak kecurangan dipicu oleh 4 aspek yakni Tekanan, Peluang, Rasionalisasi dan Kapabilitas. Aspek pertama dalam FDT adalah aspek tekanan yang mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tidak etis, baik tekanan keuangan maupun non keuangan, internal maupun eksternal. Aspek ini tidak perlu nyata, dalam arti jika seseorang meyakini bahwa dirinya tertekan maka pada dasarnya ia telah memiliki alasan untuk melakukan kecurangan (Albrecht et al. dalam Abdullahi & Mansor, 2017). Aspek peluang mengacu pada kondisi yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kecurangan akibat lemahnya sistem pengawasan maupun pengendalian internal (Tuanakotta

dalam Utomo et al., 2021). Aspek selanjutnya adalah rasionalisasi yang merupakan pemahaman dan kesadaran seseorang mengenai adanya risiko atas tindakan kecurangan yang dilakukan. Tindakan rasionalisasi ini biasanya terjadi akibat tindak kecurangan yang dilakukan telah menjadi sebuah kebiasaan atau norma dalam organisasinya, sehingga ia merasa memiliki hak untuk melakukan tindak kecurangan yang sama (Susanti & Budiwitjaksono, 2020). Aspek yang baru ditambahkan dalam konsep FDT adalah kapabilitas yang diartikan sebagai kapasitas seseorang untuk memahami pola pengawasan dan pengendalian internal organisasinya, menemukan kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian internal tersebut serta memanfaatkan kelemahan yang ditemukannya untuk melakukan kecurangan (Abdullahi & Mansor, 2017). Seseorang yang memenuhi tiga aspek dalam FTT tidak dapat serta merta melakukan tindak kecurangan jika tidak memiliki kapabilitas yang tinggi, baik dalam hal mengeksekusi perbuatan maupun menyembunyikan tindak kecurangan tersebut (Mackevičius & Giriūnas, 2013). Dengan demikian, aspek terakhir inilah yang memiliki peran besar dalam keputusan seseorang untuk melakukan tindak kecurangan atau tidak. Keempat aspek ini diduga memiliki peran terhadap keputusan seseorang untuk melakukan tindakan korup maupun tindak kecurangan lainnya.

Penelitian ini memasukkan Integritas sebagai variabel moderasi didasarkan pada konsep Teori Keagenan dimana terdapat kemungkinan agen melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan prinsipal yang dapat diminimalisasi ketika seseorang memiliki Integritas yang tinggi.

Dengan kata lain, keberpihakan individu terhadap organisasinya diyakini akan berpengaruh terhadap kemungkinan tindakan kecurangan yang akan dilakukan. Pramudita (2013) menerjemahkan Integritas sebagai keterikatan seorang individu dengan organisasinya sehingga ia memiliki loyalitas terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Integritas yang rendah dapat menyebabkan individu dalam suatu organisasi melakukan kecurangan untuk mencapai tujuan pribadinya, meski hal itu akan mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan organisasi (Jaya, 2017). Sebaliknya, Integritas yang tinggi dapat menekan kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan.

Pemerintah dan setiap pejabat publik sebagai agen, diharapkan mampu mengelola APBN sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal secara efektif dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai prinsipal. Pegawai pemerintah, dalam hal ini para pengelola keuangan, yang memiliki Integritas tinggi akan mendorong pengelolaan keuangan dilaksanakan secara optimal yang pada akhirnya berimplikasi pada efektivitas pengelolaan keuangan, baik pendapatan maupun belanja pemerintah. Integritas akan melahirkan rasa memiliki (*sense of belonging*) pengelola keuangan terhadap organisasinya. Hal ini selanjutnya akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara secara efektif, transparan dan akuntabel sesuai tujuan penyusunan APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal. Terkait efektivitas belanja pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan integritas dalam mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan berdasarkan empat aspek FDT yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas belanja pemerintah khususnya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penyusunan prosedur kerja dan

prosedur pengawasan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar sehingga pelaksanaan belanja dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer. Sumber data penelitian ini berasal dari responden kuesioner melalui tautan aplikasi Google Form. Populasi yang dipilih dalam

penelitian ini pegawai yang terkait secara langsung dalam pengelolaan keuangan sebanyak 70 orang. Sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi yakni 70 orang. Kriteria ini dipilih dengan pertimbangan bahwa para pegawai dimaksud mengetahui Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan, terlibat dalam pembahasan hasil temuan auditor dan dipandang bertanggung jawab terhadap nilai penyerapan anggaran serta tercapainya output suatu kegiatan.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuasa Pengguna Anggaran	7 orang
2	Pejabat Pejabat Penandatangan SPM	7 orang
3	Pejabat Pembuat Komitmen	5 orang
4	Bendahara Pengeluaran	7 orang
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	4 orang
6	Staf Pengelola Keuangan	40 orang
Jumlah Sampel		70 Orang

Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan kriteria skor 1 diinterpretasikan sebagai Sangat Setuju, skor 2 diinterpretasikan sebagai Setuju, skor 3 diinterpretasikan sebagai Kurang Setuju, skor 4 diinterpretasikan sebagai Tidak Setuju, skor 5 diinterpretasikan sebagai sebagai Sangat Tidak Setuju.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square (PLS)* yang merupakan model persamaan *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan pendekatan berdasarkan *variance* atau *component-based structural equation modeling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi *Outer Model*

Evaluasi *outer model* dilakukan dengan menghitung nilai *outer loading* dan validitas konvergen. Syarat penerimaan *outer loading* masing-masing indikator terhadap variabel laten/konstruk bernilai $\geq 0,7$, sedangkan syarat terpenuhinya validitas konvergen adalah nilai *Average Variance Extracted (AVE)* $\geq 0,5$. Hasil pengujian menunjukkan *outer loading* masing-masing indikator bernilai $\geq 0,7$, sedangkan nilai AVE semua variabel $\geq 0,5$ yang berarti bahwa semua variabel memenuhi syarat mutlak pengujian validitas. Uji reliabilitas mensyaratkan nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* untuk semua variabel nilainya $\geq 0,7$ dan setelah dilakukan pengujian, syarat ini terpenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel tersebut dapat dikatakan reliabel dan layak untuk dilakukan proses pengujian selanjutnya.

Selanjutnya, Tabel 3 merupakan ringkasan statistik deskriptif untuk setiap indikator yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Tekanan	1,14	5,93	3,92	1,04
Peluang	1,00	5,88	4,00	0,87
Rasionalisasi	1,86	5,57	3,67	0,98
Kapabilitas	2,10	6,00	4,23	0,95
Efektivitas Belanja Pemerintah	1,00	5,44	2,79	0,99

Integritas	1,25	5,63	3,11	1,18
------------	------	------	------	------

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa responden cenderung tidak menyetujui pernyataan-pernyataan untuk variabel dependen dan menyetujui pernyataan-pernyataan untuk variabel independen dan variabel moderasi.

Evaluasi Inner Model

Pada pengujian inner model ini, uji statistik yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (*R-squared*), *Goodness of Fit Index*, dan uji pengaruh antar variabel (hipotesis parsial).

Tabel 3. Hasil Evaluasi Inner Model

Variabel	<i>R-square</i>	<i>f-Square</i>	SRMR	NFI
Efektivitas Belanja Pemerintah	0,759			
Tekanan		0,059		
Peluang		0,045	0,074	0,609
Rasionalisasi		0,057		
Kapabilitas		0,048		
Integritas		0,228		

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *R-square* untuk Efektivitas Belanja Pemerintah sebesar 0,759. Hal ini bermakna bahwa Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kapabilitas dan Integritas memiliki pengaruh secara simultan sebesar 75,9% sebagai variabel independen terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah (E). Sementara itu, berdasarkan hasil pengujian *f-square* dapat dilihat bahwa nilai *f-square* antar variabel laten menunjukkan nilai di atas 0,35. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel eksogen dan variabel moderasi memiliki pengaruh kualitatif yang besar terhadap variabel endogen. Pengujian terhadap *Goodness of Fit* menunjukkan hasil nilai SRMR sebesar 0,074 dan nilai NFI sebesar 0,609. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian ini dinilai cukup dan dapat dilakukan pengujian hipotesis.

Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Original Sample	<i>p-values</i>	Hasil
H ₁	Pengaruh tekanan terhadap efektivitas belanja pemerintah	-0,17	0,007*	Signifikan
H ₂	Pengaruh peluang terhadap efektivitas belanja pemerintah	0,15	0,021**	Signifikan
H ₃	Pengaruh rasionalisasi terhadap efektivitas belanja pemerintah	-0,165	0,018**	Signifikan
H ₄	Pengaruh kapabilitas terhadap efektivitas belanja pemerintah	-0,142	0,033**	Signifikan
H ₅	Peran integritas dalam hubungan tekanan dengan efektivitas belanja pemerintah	-0,069	0,003*	Signifikan
H ₆	Peran integritas dalam hubungan peluang dengan efektivitas belanja pemerintah	-0,004	0,009*	Signifikan
H ₇	Peran integritas dalam hubungan rasionalisasi dengan efektivitas belanja pemerintah	-0,089	0,013**	Signifikan
H ₈	Peran integritas dalam hubungan kapabilitas	-0,108	0,032**	Signifikan

dengan efektivitas belanja pemerintah			
---------------------------------------	--	--	--

Pengaruh Tekanan Terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah

Penelitian ini membuktikan bahwa tekanan berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tekanan yang dirasakan seorang individu, semakin besar kemungkinan ia melakukan tindak kecurangan melalui pelaksanaan belanja yang tidak efektif untuk mengatasi tekanan tersebut. Dalam konteks pengelolaan keuangan, tuntutan pencapaian penyerapan anggaran yang tinggi oleh pimpinan menjadi salah satu contoh tekanan yang terjadi di hampir seluruh instansi baik tingkat pusat maupun daerah. Kebiasaan melakukan *ranking* berdasarkan nilai penyerapan anggaran, menyebabkan institusi memandang penyerapan anggaran yang tinggi sebagai suatu prestasi. Ditambah lagi penilaian kinerja pejabat struktural yang salah satunya dilihat dari besarnya penyerapan anggaran, menyebabkan pegawai yang ingin mendapatkan promosi ke jenjang yang lebih tinggi akan tergiur melakukan segala hal demi meningkatkan nilai penyerapan anggaran pada unit yang dipimpinnya.

Setiap awal tahun anggaran, Kemneterian Agama RI menetapkan target penyerapan anggaran yang kemudian diturunkan kepada masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. Target ini selanjutnya akan dipantau melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran yang menjadi agenda rutin setiap triwulan. Melalui kegiatan ini, Satker dengan penyerapan anggaran yang rendah diharapkan dapat segera melakukan percepatan belanja agar pada triwulan berikutnya terjadi peningkatan nilai penyerapan anggaran. Dalam skala yang lebih kecil, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) rutin melakukan pengecekan besaran penyerapan anggaran masing-masing setiap bulan. dan mengharapkan kenaikan penyerapan anggaran secara berkala sesuai kalender kerja yang ditetapkan. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi psikologis pegawai, sehingga memunculkan pemahaman untuk melakukan tindakan apa saja agar nilai penyerapan anggaran meningkat. Tindakan inilah yang pada akhirnya menyebabkan banyak dilakukannya belanja yang hanya berhenti pada tingkat peningkatan penyerapan anggaran namun tidak mendukung pencapaian target *output* yang telah ditetapkan.

Pengaruh Peluang Terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah

Peluang berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja pemerintah terbukti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peluang dapat menyebabkan menurunnya efektivitas belanja pemerintah. Peluang dalam hal ini, dapat timbul akibat lemahnya pengawasan internal yang pada akhirnya menyebabkan berbagai penyimpangan. Lemahnya pengawasan dapat mengakibatkan belanja dilakukan tidak dalam maksud untuk menciptakan *output* sesuai yang diinginkan meski secara ketentuan peraturan pengelolaan keuangan, belanja dimaksud tidak menyalahi aturan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 membagi urusan pengesahan belanja kepada tiga pejabat pengelola keuangan yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Di antara ketiga pejabat tersebut, PPK memegang peranan paling banyak dan paling krusial dalam hal mengesahkan atau menolak belanja yang dilakukan. Salah satu tugas yang memakan cukup banyak waktu dan membutuhkan ketelitian adalah pengujian terhadap tagihan negara yang mencakup kebenaran dan keabsahan dokumen yang menjadi persyaratan dan kelengkapan pembayaran belanja, hingga menghitung pengaruh belanja dimaksud terhadap target kinerja instansi. Pegawai yang ditunjuk sebagai PPK juga diwajibkan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). Sayangnya sertifikat tersebut sulit didapatkan, sehingga bukan menjadi hal yang aneh jika pemilik sertifikat dalam satu instansi dapat dihitung dengan jari. Selain itu, PPK yang ditunjuk juga tetap menjalankan tugas dan

fungsi sehari-harinya. Beberapa hal di atas menyebabkan pegawai enggan mengikuti pelatihan guna mendapat sertifikat. Pegawai yang memiliki sertifikat tersebut juga enggan menjadi PPK karena merasa telah memiliki tugas yang menyita waktu (Azmi et al., 2017; Rerung et al., 2017). Tuntutan menguji tagihan negara ditambah tugas sehari-hari yang juga dapat dipandang merepotkan, sehingga PPK seringkali dituntut untuk memilih salah satunya sebagai prioritas. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan celah pengawasan yang menimbulkan potensi terjadinya tindak kecurangan. Belanja akan cenderung dilakukan tanpa memperhitungkan *output* yang dapat dicapai bahkan sekedar sebagai bukti bahwa suatu kegiatan telah dilakukan.

Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah

Rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja pemerintah terbukti dalam penelitian ini. Pada dasarnya, rasionalisasi merupakan kesadaran dalam diri pelaku kecurangan bahwa tindakannya mengandung risiko yang dapat mempengaruhi dirinya sendiri maupun organisasinya. Kementerian Keuangan secara rutin memberikan penghargaan kepada instansi dengan nilai kinerja yang tinggi. Sampai tahun 2021, indikator penyerapan anggaran menjadi indikator penilaian kinerja dengan bobot nilai tertinggi yakni sebesar 20%. Hal ini biasanya menjadi salah satu rasionalisasi pelaksanaan belanja yang tidak efektif. Belanja dilakukan semata-mata bertujuan memaksimalkan penyerapan anggaran tanpa memperhatikan *output* maupun *outcome* belanja dimaksud. Penyerapan anggaran yang tinggi akan memberikan kontribusi yang tinggi pula pada nilai indikator kinerja yang pada akhirnya akan berimplikasi pada 'prestasi' instansi. Belanja yang dianggap tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi seperti kegiatan pelepasan seorang pegawai yang menjabat sebagai pimpinan tinggi atau pelaksanaan konsinyering yang ditetapkan selama 3 hari meski agenda sudah selesai dibahas pada hari kedua menjadi salah satu bentuk belanja yang tidak efektif meski mempengaruhi capaian penyerapan anggaran karena nilai belanja yang cukup besar.

Selain rasionalisasi dalam hal penyerapan anggaran, rasionalisasi lain yang sering muncul dalam pelaksanaan belanja yang tidak efektif berkaitan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan yang mewajibkan adanya pengembalian ke kas negara biasanya diselesaikan melalui belanja alat tulis kantor. Pengajuan alat-alat tulis kantor pada akhirnya tidak benar-benar berwujud alat tulis kantor melainkan uang tunai yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai pengembalian. Tindakan ini biasanya dianggap sebagai *win-win solution* karena belanja tersebut dapat mempengaruhi besar penyerapan anggaran sekaligus menjadi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pengaruh Kapabilitas Terhadap Efektivitas Belanja Pemerintah

Kapabilitas berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja pemerintah dapat diterima. Kapabilitas menjadi aspek paling penting dan berpengaruh dalam konteks FDT secara keseluruhan. Seseorang dengan kapabilitas yang tinggi, memiliki kemampuan untuk menganalisis *Standard Operating Procedure* (SOP), menemukan celah dalam alur SOP dan memanfaatkan celah dimaksud untuk meraih keuntungan pribadi. Dengan kata lain, kapabilitas mampu menyebabkan seseorang menemukan peluang dan menyesuainya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tidak hanya sampai pada menemukan peluang saja, seseorang dengan kapabilitas tinggi dapat menciptakan rasionalisasi untuk mendukung tindakan yang telah dilakukannya, termasuk mengelola *deceit* maupun stres. Dalam konteks belanja pemerintah, belanja-belanja yang tidak sesuai ketentuan maupun tidak mendukung target keluaran dapat disesuaikan sedemikian rupa untuk tetap lolos dari verifikasi PPK. Kapabilitas pegawai dalam hal adaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi, dapat berpengaruh terhadap kemampuannya untuk menyesuaikan belanja yang dilakukan. Kapabilitas pegawai juga dapat mendukung tindakannya dalam memilah informasi untuk

disampaikan kepada atasannya. Informasi mengenai capaian *output* atas suatu kegiatan dan belanja dapat dibuat sesuai dengan keinginan pimpinan agar seolah-olah belanja yang dilakukan memang mendukung tercapainya *output* kegiatan tersebut.

Instansi pemerintah diberikan kemudahan dalam hal penyediaan perangkat lunak untuk mendukung tugas dan fungsinya. Pegawai dengan kapabilitas yang mumpuni dapat memanfaatkan perangkat dimaksud untuk melancarkan tindak kecurangan yang sudah direncanakan seperti menyesuaikan tagihan belanja. Lebih lanjut, pegawai dengan kapabilitas tinggi mampu mengontrol tekanan psikologis yang timbul akibat tindak kecurangan yang dilakukannya. Hal ini termasuk juga menyiapkan solusi atas berbagai kemungkinan dipertanyakannya tindakan tersebut oleh pimpinan, PPK bahkan pemeriksa. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, belanja yang dilakukan dalam rangka memberikan apresiasi kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti dapat disesuaikan dengan menggabungkan pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan kegiatan lain yang menjadi tugas dan fungsi instansi. Meski demikian, agenda pelaksanaan yang disampaikan pada laporan kegiatan disesuaikan sedemikian rupa agar pemeriksa hanya mendapat informasi bahwa kegiatan dimaksud memang mendukung tugas dan fungsi instansi tanpa disertai dengan tujuan lainnya.

Peran Integritas Dalam Hubungan Tekanan Dengan Efektivitas Belanja Pemerintah

Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa integritas memperlemah pengaruh negatif tekanan terhadap efektivitas belanja pemerintah. Seseorang dengan integritas yang tinggi, menempatkan tujuan organisasi di atas tujuan pribadinya. Kesediaan seseorang untuk mengutamakan organisasi di atas dirinya sendiri secara sukarela menjadi wujud tingginya integritas yang dimiliki. Hal ini pada akhirnya menyebabkan terminimalisasinya kemungkinan seorang pegawai melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Integritas juga dipahami sebagai loyalitas dan keterikatan terhadap nilai-nilai organisasi tempat seorang pegawai bekerja.

Tata nilai etik dan perilaku pegawai yang dirangkum dalam Lima Budaya Kerja yakni Integritas, Profesionalitas, Inovatif, Tanggung Jawab dan Keteladanan. Seluruh pegawai di lingkungan kementerian mempedomani tata nilai ini dalam setiap aspek pekerjaan termasuk dalam hal pengelolaan keuangan khususnya nilai Akuntabel yang didefinisikan sebagai kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, berbagai kebijakan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran tidak terlepas dari usaha mewujudkan tata nilai dimaksud. Pimpinan sebagai penanggung jawab anggaran secara aktif berkoordinasi mengenai kendala dan hambatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. Kepedulian pimpinan ini mampu menumbuhkan rasa keterikatan pegawai terhadap institusi dan secara bersama-sama meminimalisasi tindakan pegawai untuk mencapai tujuan pribadinya.

Peran Integritas Dalam Hubungan Peluang Dengan Efektivitas Belanja Pemerintah

Integritas memperlemah pengaruh negatif peluang terhadap efektivitas belanja pemerintah terbukti dalam penelitian ini. Sebagaimana diketahui lemahnya pengawasan internal yang pada akhirnya menimbulkan pengawasan yang tidak efektif. Pengawasan internal yang lemah dapat diakibatkan oleh sikap lalai dan apatis seseorang terhadap ketentuan yang berlaku. Tindakan ini biasanya timbul akibat persepsi seseorang bahwa ia tidak berpengalaman atau tidak mengetahui dasar pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Ditambah keengganan pegawai untuk belajar, sikap ini semakin menguat dan pada akhirnya menyebabkan ia melakukan pekerjaannya dengan setengah hati dan tidak memperhatikan kualitas hasil kerjanya. Sementara itu wujud integritas dapat berupa keterlibatan kerja yang diwujudkan dengan kemauan untuk memberikan waktu dan tenaga untuk melaksanakan pekerjaan dengan optimal. Integritas yang tinggi menyebabkan seseorang menerima apapun

tugas diberikan kepadanya, bertanggung jawab atas proses dan hasil pekerjaan tersebut dengan optimal.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, pegawai Kementerian Agama telah menginternalisasi semangat nilai Profesional sesuai tata nilai Lima Budaya Kerja Kementerian Agama. Profesional dimaknai sebagai semangat untuk menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian, pimpinan menyediakan akses yang sangat mudah dan terbuka bagi para pejabat pengelola keuangan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan latihan baik yang diselenggarakan oleh internal Kementerian maupun bersinergi dengan Kementerian Keuangan. Pengajuan dan permintaan peserta diklat direspon positif oleh pimpinan melalui kemudahan pemberian Surat Perintah dan pembebasan dari tugas sehari-hari selama mengikuti kegiatan. Hal ini diharapkan dapat membantu pejabat pengelola keuangan untuk fokus meningkatkan kompetensi dan keahliannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Peran Integritas Dalam Hubungan Rasionalisasi Dengan Efektivitas Belanja Pemerintah

Integritas memperlemah pengaruh negatif rasionalisasi terhadap efektivitas belanja pemerintah terbukti dalam penelitian ini. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian Keuangan menetapkan 11 (sebelas) indikator penilaian kinerja dengan menempatkan indikator penyerapan anggaran sebagai indikator yang memiliki bobot tertinggi yakni sebesar 20%. Hal ini menjadi salah satu penyebab instansi pemerintah berlomba-lomba mencapai angka penyerapan yang telah ditetapkan. Kepentingan penyerapan anggaran yang tinggi menjadi salah satu motivasi tindakan kecurangan meski tindakan tersebut memiliki risiko menjadi temuan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdampak pada *image* instansinya.

Pada beberapa instansi, lazim ditemukan penyelesaian temuan Auditor dilakukan melalui 'jalan pintas', biasanya berupa pembelian ATK yang kemudian diuangkan. Tindakan ini biasanya dianggap sebagai solusi yang menyelesaikan beberapa permasalahan sekaligus karena belanja tersebut dapat mempengaruhi besar penyerapan anggaran sekaligus menjadi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Semangat nilai Tanggung Jawab sesuai tata nilai Lima Budaya Kerja Kemenag menetapkan para pegawai untuk mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku dan tugas termasuk dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Peran Integritas Dalam Hubungan Kapabilitas Dengan Efektivitas Belanja Pemerintah

Integritas memperlemah pengaruh negatif kapabilitas terhadap efektivitas belanja pemerintah dapat terbukti. Integritas yang rendah dapat menyebabkan individu dalam suatu organisasi melakukan kecurangan untuk mencapai tujuan pribadinya, meski hal itu akan mengakibatkan pencapaian tujuan organisasi sedikit terhambat. Sebaliknya, Integritas yang tinggi dapat menekan kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan karena adanya rasa memiliki terhadap organisasi dan kemauan untuk melindungi organisasinya dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan.

Segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pada dasarnya dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi organisasinya. Tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, kecurangan pegawai dapat berdampak pada perspektif masyarakat pada organisasinya. Hal ini menyebabkan pegawai dengan Integritas yang tinggi sebisa mungkin menghindari tindakan kecurangan dan segala tindakan yang memudahkan kecurangan itu terjadi.

Tidak dapat dipungkiri, pengelolaan keuangan negara yang baik tidak terlepas dari kualitas SDM yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Memiliki kualitas individu yang baik ditambah dengan Integritas yang tinggi, seorang pegawai akan bersedia untuk memaksimalkan kemampuannya bagi kepentingan organisasi dan menghindari berbagai tindak kecurangan meski ia menemukan celah dan

memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa aspek tekanan, peluang, rasionalisasi dan kapabilitas berpengaruh negatif terhadap efektivitas belanja pemerintah. Sementara itu Integritas sebagai variabel moderasi mampu memperlemah pengaruh negatif keempat aspek tersebut terhadap efektivitas belanja pemerintah. Keterbatasan dalam penelitian ini sampel yang masih sangat terbatas pada pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, padahal untuk aspek tertentu pengambilan sampel kepada pegawai di luar pengelola keuangan mungkin dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Penyebaran kuesioner penelitian yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Form juga menjadi keterbatasan karena tidak dapat dipastikan bahwa pengisian kuesioner benar-benar dilakukan oleh sampel dalam penelitian

Kantor Kementerian Agama Kab. Takalar dan seluruh satuan kerja yang berada dilingkungan Kantor Kemenag Kab, Takalar perlu terus mengupayakan peningkatan Integritas. Perubahan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Integritas hendaknya tidak berhenti pada aspek yang terlihat secara langsung oleh publik, namun juga pada hal-hal yang berpengaruh pada alam bawah sadar para pegawai. Selain itu, pemahaman mengenai pentingnya penyerapan anggaran dapat dibarengi dengan pemahaman tentang pentingnya output maupun outcome atas belanja yang dilakukan. 'Pemaksaan' terhadap instansi untuk memperhatikan output dan outcome belanja, dapat dilakukan melalui penyusunan kembali nilai indikator kinerja oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dengan setidaknya memberikan bobot yang sama bagi indikator penyerapan anggaran dengan indikator capaian output. Selain itu, peningkatan kompetensi para pejabat yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan keuangan juga perlu menjadi perhatian. Kecenderungan penempatan pegawai tanpa memperhatikan kompetensi dan menggunakan justifikasi berupa kepentingan organisasi harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas peningkatan kompetensi yang memadai untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya asimetri informasi akibat ketimpangan pemahaman antar pejabat pengelola keuangan.

Referensi :

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2017). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding The Convergent And Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38-45. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>
- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud Prevention Initiatives In The Nigerian Public Sector: Understanding The Relationship of Fraud Incidences and The Elements of Fraud Triangle Theory. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527-544. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0008>
- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal of Management*, 12(2), 167-178. <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>
- Angrina, R. (2017). Pengaruh Penerapan E-Procurement, Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa dan Implikasinya

- Terhadap Penyerapan Belanja Modal Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 5(2), 1–20. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2599>
- Azmi, L. M., Herwanti, T., & Asmony, T. (2017). E-Procurement Fraud In Government Sector: In The Perspective of Fraud Diamond Theory. *International Conference and Call For Paper, Good Corporate Governance to Face Global Business Competition*, 143–163. <http://jurnal.stie-mandala.ac.id/index.php/eproceeding/article/view/131/>
- Bendickson, J., Muldoon, J., Liguori, E., & Davis, P. E. (2016). Agency Theory: Background and Epistemology. *Journal of Management History*, 22(4), 437–449. <https://doi.org/10.1108/JMH-06-2016-0028>
- Bulan, S. G. I., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. (2017). Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 263–271. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17214.2017>
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Review*, 15(6), 738–743. <https://doi.org/10.2307/2086606>
- Dincer, O., & Teoman, O. (2019). Does Corruption Kill? Evidence From Half A Century Infant Mortality Data. *Social Science and Medicine*, 232, 332–339. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.05.017>
- Duerrenberger, N., & Warning, S. (2018). Corruption and Education In Developing Countries: The Role of Public VS Private Funding of Higher Education. *International Journal of Educational Development*, 62(September 2017), 217–225. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.05.002>
- Faisol, F. (2018). Analisis dampak pengeluaran publik dan efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia [Universitas Nusantara PGRI Kediri]. <http://repository.unpkediri.ac.id/3608/>
- Faradiza, S. A. (2019). Fraud Pentagon dan Kecurangan Laporan Keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1060>
- Farida, S. N. (2017). Analisis Pengaruh Fraud Diamond, Personal Attitude dan Effectiveness of Internal Control Terhadap Tendensi Kecurangan Karyawan Pada Dealer Otomotif Di Wilayah Jombang [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9600/>
- Fitri, F., & Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity),

- Rasionalisasi (Rationalization), dan Kapabilitas (Capability) Terhadap Pengadaan Barang / Jasa Di Pemerintahan Aceh Dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(1), 69–84. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/15437/0>
- Haryanto, J. T., & Astuti, E. S. (2017). Analysis For Corruption and Decentralization (Case Study : Earlier Decentralization Era In Indonesia). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(4), 207–218. <https://doi.org/10.22437/ppd.v4i4.3799>
- Hasanah, M., & Anitasari, M. (2020). Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014-2017 (Tinjauan Efisiensi dan Efektivitas). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10905>
- Jaya, A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. *Forum Bisnis dan Kewirausahaan*, 7(1), 1–14. <https://forbiswira.stie-mdp.ac.id/wp-content/uploads/2017/09/2.-PDF-Andika.pdf>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kisieliauskas, J., & Rudgalvis, J. G. (2017). The Assessment of Influence of Functional Government Expenditure On Subjective Wellbeing In EU. *Applied Economics: Systematic Research*, 11(1), 13–26. <https://doi.org/10.7220/aesr.2335.8742.2017.11.1.1>
- Kurniawansyah, D., Kurnianto, S., & Rizqi, F. A. (2018). Teori Agency Dalam Pemikiran Organisasi; Pendekatan Positivist dan Principle-Agen. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(2), 435–446. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i2.122>
- Lestari, Y. I. (2020). Pengaruh Tingkat Variabel Karakteristik Individu, Keadilan Organisasi, dan Budaya Organisasi Terhadap INTEGRITAS Karyawan PT. Dana Mandiri Sejahtera cabang Ponorogo [Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. <http://eprints.umpo.ac.id/5891/>
- Lewis, B. (2013). Local Government Capital Spending In Indonesia: Impact of Intergovernmental Fiscal Transfers. *Public Budgeting and Finance*, 33(1), 76–94. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2013.12002.x>
- Mackevičius, J. (2012). Branches of Fraud Tress and Conditions of Their Growth. *Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspective*, 1(8), 142–147. <https://doi.org/10.15544/ssaf.2012.19>
- Mackevičius, J., & Giriūnas, L. (2013). Transformational Research of The Fraud Triangle. *Ekonomika*, 92(4), 150–163. <https://doi.org/10.15388/ekon.2013.0.2336> Mallick, R. N.

- (2020). Government Spending and Per Capita GDP Growth in India. *Journal of Education and Development*.
- Nourmanita, N. A. (2015). Belanja Publik (Expenditure Assignment) Antara Masalah dan Efektivitas Anggaran Belanja. *Jurnal Natapraja*, 4(1), 31–48. <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12613>
- Pramudita, A. (2013). Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v2i1.1156>
- Rachman, I., & Dyahrini, W. (2021). The Effect of Internal Control and Organizational Commitment To Fraud Prevention In Hospital X In The City of Bandung Indonesia. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 1038–1043. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i8.2985>
- Ramdhana, S. A. (2015). Persepsi Pegawai Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kebumen) [Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/22588/>
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 192–202. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17947>
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 7(1), 474–476. <http://ijbmer.com/docs/volumes/vol7issue1/ijbmer2016070102.pdf>
- Sari, A. R. (2017). Pengaruh Perilaku Opportunistik, Mekanisme Pengawasan, dan Financial Distress Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(4), 67–83. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18197>
- Setiawan, I. P. I., & Piartrini, P. S. (2018). Pengaruh Pemberdayaan Karyawan dan Stres Kerja Terhadap INTEGRITASonal Karyawan Departemen Housekeeping Pada Villa Ocean Blue. *E- Jurnal Manajemen*, 7(1), 164–191. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i01.p07>
- Silfiani, M., Wijayanto, S. A., & Fauzi, A. K. (2021). Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Kualitas Sumber Daya Manusia, INTEGRITAS, dan Budaya Organisasi. *Strategic: Journal of Management Sciences*, 1(2), 54–68. <https://doi.org/10.37403/strategic.v1i2.15>
- Solihin, A., Mursinto, D., & Sugiharti, L. (2017). Efficiency and Effectiveness of Government

- Expenditure on Education at Districts/Cities Level In East Java Indonesia. *Asian Social Science*, 13(8), 91. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n8p91>
- Sorunke, & Abayomi, O. (2016). Personal Ethics and Fraudster Motivation: The Missing Link In Fraud Triangle And Fraud Diamond Theories. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 6(2), 159-165. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v6-i2/2020>
- Subandoro, Y. K., & Amir, H. (2017). Pengaruh Korupsi Terhadap Peranan Pengeluaran Negara Dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 3(3), 35. <https://doi.org/10.31685/kek.v1i3.305>
- Susanti, E. Y., & Budiwitjaksono, G. S. (2020). Fraud Diamond Theory dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *Behavioral Accounting Journal (BAJ)*, 2(2), 207-223. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i2.51>
- Tanzerina, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating. *JOM Fekon*, 4(1), 586-600. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12347>
- Utami, I., Astiti, Y. W., & Mohamed, N. (2019). Fraud Intention and Machiavellianism: An Experimental Study of Fraud Triangle. *International Journal of Financial Research*, 10(5), 269-279. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p269>
- Utomo, B., Irianto, G., & Roekhudin, R. (2021). The Effect of Individual Intention on Fraud Behavior: Religiosity As Moderating Variable. *Research in Business & Social Science*, 10(3), 369-379. <https://www.ssbfnnet.com/ojs/index.php/ijrbs/arti>